

**KEPENTINGAN KOREA SELATAN MENJALIN KERJASAMA DENGAN VIETNAM
MELALUI KOREA ODA (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE)**

Oleh: Larasati

Larasati1584@gmail.com

Supervisor: Ahmad Jamaan S.IP., M.Si

Bibliography: 23 Jurnal, 20 Buku, 7 Dokumen Resmi, 3 Tesis dan 42 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

South Korea has become a major partner of Foreign Development Assistance to Vietnam after the restoration of Strategic Cooperation between the two countries. Korea in particular gave Vietnam the largest part of ODA in the form of loans and grants. This research was prepared using the perspective of Liberalism, the theory of Foreign Aid and the concept of National of Interest. This Research used descriptive qualitative research methods which is the research data was obtained through literature review and library research. This study aims to determine Korea interests behind the large and consistent contribution of ODA to Vietnam. As for the feedback Vietnam provides a favorable business climate for Korea with several conditions namely first, through LOI and LOE regulations governing companies and investments in Vietnam. This study indicate that Vietnam has made various efforts to improve the business environment that attracts foreign investors, especially South Korea. This is proven by Korea as the biggest contributor to Foreign Direct Investment in Vietnam.

Keywords: Foreign Development Assistance, Foreign Direct Investment, LOI and LOE, ODA, Strategic Cooperation, WTO.

NDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah tentang Kepentingan Korea Selatan Menjalin Kerjasama Dengan Vietnam Melalui Korea ODA (*Official Development Assistance*). Keberhasilan ekonomi Korea Selatan disebut dengan “*Miracle of Han*” atau keajaiban sungai Han, arti dari sebutan ini adalah karena Korea Selatan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang disegani dalam dunia Internasional.¹ Pencapaian ini tidak terlepas dari pengaruh pergeseran dalam kebijakan industri Korea pada masa pemerintahan Presiden *Park Chung Hee* yang menggantikan kebijakan substitusi impor dari pendahulunya, dengan kebijakan promosi ekspor. Kebijakan ini terfokus untuk perusahaan Korea Selatan yang mengeksport barang-barang mereka ke pasar luar negeri, akan mendapatkan berbagai subsidi seperti preferensial pinjaman, dari pemerintah selama tahun-tahun berikutnya setelah tahun 1961 guna menunjang sistem produksi mereka. Sistem ini juga dikenal sebagai model *developmental state*.² *Developmental state* adalah suatu paradigma yang mempengaruhi arah dan kecepatan pembangunan ekonomi dengan secara langsung mengintervensi proses pembangunan, yang mana hal ini berbanding terbalik dengan cara berpikir yang lebih mengandalkan kekuatan pasar dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi.³

Kepentingan ekonomi merupakan kepentingan nasional suatu negara untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain untuk memajukan perekonomian negara itu sendiri melalui interaksi kerjasama internasional dalam berbagai aspek di bidang ekonomi. Kerjasama ini diwujudkan dalam berbagai bentuk implementasi sesuai kebutuhan dari negara bersangkutan, salah satunya seperti program bantuan pinjaman yang saat ini

banyak digunakan negara-negara berkembang untuk bekerjasama dengan ODA.

Korea Selatan dan Vietnam meresmikan hubungan bilateral mereka pada Pada 22 Desember 1992, peristiwa ini membuka era baru bagi hubungan kerjasama antara kedua negara. Pada tahun 2001, selama kunjungan Presiden Vietnam *Tran Duc Luong* ke Korea selatan, kedua negara sepakat untuk membentuk “Kemitraan Kerjasama Komprehensif”. Pada kunjungan kenegaraan tahun 2009 di Vietnam, Presiden Korea Selatan *Lee Myung Bak* membawa agenda untuk meningkatkan hubungan menjadi “Kemitraan Kerjasama Strategis” atau KVSP (*The Korea-Vietnam Strategic Partnership*). Kedua negara sejak saat itu telah bekerja sama secara intensif dalam pengembangan di sektor perdagangan, investasi, pendidikan dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pariwisata, dan ODA. Dari segi ODA Korea ke Vietnam sejauh ini mengalami Pertumbuhan angka pinjaman yang meningkat secara signifikan, terutama setelah masuknya Vietnam dalam keanggotaan WTO pada 2007. Hal ini membuka peluang Vietnam semakin besar untuk memperluas hubungan kerjasama lintas batas negara.

Nilai ODA meningkat lebih dari dua kali lipat pada periode 2006-2010 hingga mencapai 264 juta USD, dan mengalami pelonjakan secara intensif hingga lebih dari 1 miliar USD, jumlah ini menunjukkan angka yang akan terus meningkat untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini ditandai dengan komitmen Korea melalui ODANYA ke Vietnam setelah pembaharuan kesepakatan dengan suntikan dana sebesar 1,5 miliar USD untuk periode 2016-2020. Korea-Vietnam melalui ODA berkomitmen untuk melanjutkan program ini dalam kesepakatan *Framework Arrangement* yang ditandatangani pada 27 Desember 2017. Bantuan ODA Korea terdiri dari bantuan hibah bilateral, pinjaman bilateral, dan bantuan multilateral. Bantuan ODA ke Vietnam adalah dalam bentuk hibah dan pinjaman bilateral. Sejak 1993, Vietnam telah menerima hibah bilateral senilai sekitar 160 juta USD, terhitung kurang dari 10% dari total bantuan pembangunan dari Korea.⁴ Pinjaman

¹ Masoed, Mochtar dan Y.S. Yoon, *Memahami Politik Korea* (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2005), 18.

² M.Hemmer, *Tiger Mangement; Korean Companies on World Market* (New York: Routledge Press, 2012), 45.

³ Suwarno, Yogi, *Developmental State* (STIA-LAN Jakarta: Bunga Rampai Administrasi Publik, 2006), 1.

⁴ Vu Thanh Huong & Nguyen Thi Minh Phuong, “Assessing the effectiveness of South Korea’s development assistance in Vietnam,” *VNU Journal of Science: Economics and Business* 34, no. 2 (2018): 6.

bilateral adalah bentuk utama bantuan pembangunan Korea ke Vietnam. Sebelum tahun 2008, ODA memberikan pinjaman kecil, untuk 13 proyek bernilai 600 juta USD, termasuk 1 miliar USD antara tahun 2008-2011. Angka ini Meningkat menjadi 1,2 miliar USD antara tahun 2012-2015. Nilai total pinjaman lunak untuk periode 2008-2015, telah mencapai angka 1,7 miliar USD, dan mencapai angka 1,5 miliar USD selama periode 2016-2020.⁵

Bantuan pembangunan ODA telah menjadi suatu opsi atau alternatif yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang, salah satunya adalah Vietnam, negara ini telah menjadi pilihan prioritas ODA Korea dengan keuntungan-keuntungan yang menjanjikan bagi Korea. Vietnam dianggap sebagai pilihan paling tepat untuk menyalurkan ODA dengan pertimbangan yang lebih menguntungkan daripada negara di wilayah Asia Tenggara lainnya.

KERANGKA TEORI

Liberalisme memandang bahwa hubungan internasional bersifat kooperatif. Terdapat empat Asumsi dasar liberalisme yaitu pertama, sifat manusia itu baik berarti manusia mampu untuk bekerjasama. Kedua, adalah keyakinan bahwa HI lebih bersifat kooperatif dari pada konflikual. Kaum Liberalis percaya bahwa negara pada hakikatnya dibentuk oleh manusia, karena itu negara memiliki sifat dasar yang sama dengan manusia.⁶ Aktor HI menurut liberalisme bukan hanya negara tetapi juga melibatkan aktor non negara seperti MNC, organisasi internasional, dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran liberal sangat erat kaitannya dengan munculnya negara liberal modern. Liberal meyakini tentang potensi yang besar bagi kemajuan manusia dalam *civil society* dan perekonomian kapitalis modern dimana keduanya dapat berkembang dalam negara-negara yang menjamin kebebasan individu.

Modernitas membentuk kehidupan yang baru dan lebih baik, bebas dari pemerintahan yang otoriter dan dengan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi. Ketika semua negara menerapkan prinsip ini,

maka negara-negara itu akan saling menghargai dan saling mempercayai satu sama lain. Penulis menggunakan perspektif liberalism (John Locke) yang mana ia berpendapat bahwa adanya potensi yang besar bagi kemajuan manusia dalam *civil society* dan perekonomian kapitalis modern, keduanya dapat berkembang dalam negara-negara yang menjamin kebebasan individu.

Penulis menggunakan tingkat analisa negara-bangsa (*nation state*) karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Dalam hal ini, perilaku individu, kelompok. Organisasi, lembaga dan proses perpolitikan hanya akan diperhatikan sejauh perilaku mereka berkaitan dengan tindakan internasional negara pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh.⁷ Di dalam penelitian ini negara-bangsa yang dimaksud adalah Korea Selatan dan Vietnam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Bantuan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari suatu negara kepada negara lain dalam bentuk barang atau jasa.⁸ Pengertian bantuan luar negeri secara sempit menurut ahli ekonomi Robert Gilpin, bantuan luar negeri adalah sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju kepada negara yang kurang maju atau secara ekonomi lebih miskin.⁹ Sedangkan menurut KJ Holsti bantuan luar negeri dalam arti luas adalah merupakan transfer uang, barang-barang, teknologi, ataupun nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima.¹⁰

Bantuan luar negeri pada umumnya bertujuan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Bantuan luar negeri digunakan untuk membantu menjamin beberapa tujuan ekonomi politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau

⁷ *Ibid.*

⁸ Perwita, Anak Agung B. & Yani, Yanyan M, Yanyan M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 18.

⁹ Gilpin, Robert, *The Political Economy of International Relations* (New Jersey: Princeton University Press, 1987), 131.

¹⁰ Holsti, K. J, *International Politics A framework for Analysis 6th Edition* (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1992), 192.

⁵ *Ibid.*

⁶ Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2014), 175.

kebijakan publik semata. Meskipun sebagian besar diantara negara donor mengatasnamakan motivasi moral, kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam merealisasikan kepentingannya. Kerjasama antara Korea Selatan-Vietnam melalui bantuan ODAny, dimanfaatkan oleh kedua negara untuk saling merealisasikan kepentingan mereka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional oleh Hans J. Morgenthau. Adanya suatu interaksi yang terjalin antara satu negara dengan negara lain merupakan inti dari Hubungan Internasional. Dibalik suatu interaksi kepentingan memainkan peran dalam menyebabkan suatu negara menjalin interaksi atau kerjasama lintas batas negara. Ada beberapa kepentingan yang menjadi alasan suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain yaitu, kepentingan nasional (*National Interest*) dan kekuasaan nasional (*National Power*). Terdapat tiga esensi dari interaksi ada yaitu, *actors* (pelaku), *interest* (kepentingan), *power* (kekuasaan). Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.¹¹ Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Pembangunan Korea ODA

Bantuan pembangunan resmi atau ODA didefinisikan sebagai bantuan pemerintah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan di negara-negara berkembang. ODA termasuk sebagai penyedia hibah, pinjaman, dan bantuan teknis untuk negara-negara berkembang dan organisasi internasional. Definisi ODA telah muncul sejak OECD membentuk Development Assistance Committee (DAC) pada tahun 1961. Konsep lebih luas mengenai ODA adalah kerjasama pembangunan internasional yang menekankan kepada upaya dan tindakan internasional untuk mengurangi ketidaksetaraan antara negara-negara maju dan berkembang, serta melindungi hak-hak dasar manusia melalui penumpasan kemiskinan. Faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah mendorong terjadinya kemiskinan di negara-negara berkembang. Masalah ini telah menjadi isu global yang membutuhkan upaya atau tindakan internasional jangka panjang secara terkoordinasi.

Sebelum munculnya ODA, upaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai solusi utama mengatasi masalah kemiskinan, namun saat ini komunitas internasional berpandangan bahwa upaya multidimensi diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sekaligus pembangunan masyarakat secara lebih menyeluruh. Sejalan dengan hadirnya tren ODA, pendekatan pembangunan telah diambil melalui beragam langkah mencakup upaya untuk mencapai pembangunan dalam aspek infrastruktur, ekonomi dan sosial, stabilisasi politik, pembangunan kapasitas dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama pembangunan yang berkembang semakin pesat dengan kesempatan yang semakin terbuka luas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya sumber-sumber baru untuk melengkapi pembiayaan pembangunan yang terus tumbuh, sehingga ODA menjadi salah satu opsi menguntungkan bagi negara penerima maupun negara pendonor.

Sebelum adanya tren bantuan ODA, istilah-istilah bantuan luar negeri dikenal dengan istilah seperti *development assistance*, *foreign aid*, dan *overseas aid*, istilah-istilah ini digunakan untuk merujuk kepada kerjasama bantuan pembangunan.

Sejarah Korea ODA

Setelah lepas dari kolonialisme Jepang pada tahun 1945 hingga akhir 1990an, Korea menerima total bantuan asing kurang lebih

¹¹ P.Anthonius Sitepu, Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 165.

sebesar 12,7 miliar USD.¹² Saat itu Korea merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Target bantuan yang disalurkan oleh komunitas internasional adalah memberikan bantuan dengan jumlah anggaran yang besar sehingga Korea dapat memaksimalkan bantuan dalam upaya pembangunan ekonomi di Korea. Bantuan yang diberikan kepada Korea bervariasi tergantung pada kondisinya. Kategori bantuan yang diberikan adalah bantuan darurat hingga program penyesuaian secara struktural dimana hampir semuanya berkontribusi untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Korea. Program bantuan luar negeri yang diberikan kepada Korea secara efektif telah menjadikan negara ini sebagai contoh dari keberhasilan program bantuan yang memicu pembangunan sosial dan ekonomi Korea semakin maju. *Foreign aid* yang diberikan secara efektif di setiap sektor penting mampu mendorong pertumbuhan pembangunan di Korea pasca meletusnya perang Korea tahun 1950-1953. Pada tahun 1960an Ketika Korea masih menerima bantuan dari komunitas internasional, di waktu yang sama Korea juga memainkan peran sebagai negara pendonor. Pada tahun 1963, untuk pertama kali Korea menyelenggarakan program undangan pelatihan bagi negara-negara berkembang. Selain itu Korea juga menyediakan persediaan, dana, dan mengirim para ahlinya ke luar negeri untuk berbagi pengalaman dalam meningkatkan pembangunan di Korea dan memantapkan status nasionalnya di panggung global.

Sistem dan Implementasi Korea ODA

Pemerintah Korea melakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan meningkatkan sistem ODA dengan menggunakan sistem rangkap. Mekanisme dari sistem ini menerapkan hibah dan pinjaman disediakan oleh dua lembaga pelaksana berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah ODA, diikuti dengan

peningkatan jumlah lembaga pelaksana yang sesuai, permintaan untuk mekanisme koordinasi yang lebih kuat dibentuk agar dapat menyatukan beragam aktor ODA ke dalam satu platform sehingga akan memaksimalkan fungsi ODA. Sistem ODA Korea terus dikembangkan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Korea. Korea menerapkan penguatan koordinasi secara bertahap terkait kebijakan untuk program hibah dan pinjaman. Kerangka Undang-Undang tentang Kerjasama Pembangunan Internasional diberlakukan pada 2010, meletakkan dasar bagi sistem ODA terpadu yang dipimpin oleh CIDC.

Perubahan ODA Korea dapat dikategorikan menjadi tiga periode, yang masing-masing didefinisikan sebagai tonggak utama dalam sejarah ODA Korea. Tujuan dari ODA adalah yang Pertama, ODA harus didasarkan pada pengalaman pembangunan Korea. Kedua, ODA bertujuan untuk mempromosikan hubungan baik antara Korea dan negara-negara berkembang. Berbeda jika untuk tujuan pendekatan. Kementerian Strategi dan Keuangan berfokus kepada industrialisasi berbasis pinjaman Korea, dengan mempromosikan kerjasama ekonomi. Sedangkan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan menekankan kepada “citra Korea yang lebih baik” dalam komunitas global dengan mengikuti norma dan prinsip dari DAC.

Iklim Bisnis yang menguntungkan

Dewasa ini, banyak cara dilakukan oleh sebuah negara untuk mempromosikan kerjasama dengan negara lain. Korea cenderung memprioritaskan Vietnam dalam memberikan ODA, padahal banyak negara lain yang juga berada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memicu pertanyaan mengapa Korea memprioritaskan Vietnam?, apa yang membuat Vietnam berbeda dari negara lain yang berada di kawasan yang sama. Perbedaannya adalah karena Vietnam merupakan mitra strategis penting Korea dalam bidang ekonomi dengan iklim bisnis yang menguntungkan dengan serangkaian kebijakan investasi yang menarik investor asing. Ketika Korea-Vietnam menjalin kerjasama ekonomi, perusahaan-perusahaan Korea seperti Samsung, LG, SK, Hanwah, Hyundai, dan Daewoo, Vietnam memberikan kondisi menguntungkan dan insentif yang menjanjikan. Pasca kebijakan Doi Moi Vietnam memulai pembaruan dalam rangka memperluas kerjasama internasional dengan

¹² Axel Marx dan Jadir Soares, “South Korea’s Transition from Recipient to DAC Donor: Assessing Korea’s Development Cooperation Policy,” *International Development Policy journal* (2013): 107-142.

melakukan integrasi ekonomi regional, dan internasional. Sesuai dengan kebijakan tersebut, pada tahun 1987 Majelis Nasional Vietnam mengadopsi Undang-Undang Investasi Asing dengan ketentuan-ketentuan yang cukup terbuka. Sejak saat itu, Undang-undang ini telah diubah empat kali. Amandemen terbaru yang terkandung dalam Undang-Undang Investasi mulai berlaku sejak 1 Juli 2006.¹³

UU Perusahaan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2006 menetapkan kerangka hukum seragam yang berlaku untuk seluruh perusahaan di semua sektor ekonomi dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi biaya masuk pasar. Langkah penyatuan pendaftaran usaha dan pendaftaran investasi, membantu investor domestik dan asing untuk mendaftarkan usaha mereka bersama dengan investasi jika pendaftaran usaha mereka melekat pada proyek investasi tertentu. Sementara itu, terdapat peraturan tambahan tentang pengelolaan negara atas perusahaan untuk mencegah adanya pembatasan pendirian usaha untuk tujuan non-usaha, dan bahaya perusahaan yang tidak beroperasi sesuai dengan prosedur pembubaran UU Perusahaan dengan lingkungan bisnis yang sehat. Upaya Vietnam selama bertahun-tahun untuk memperbaiki lingkungan bisnisnya telah membantu Vietnam menciptakan pasar atau lingkungan bisnis yang cukup menarik bagi investor asing. Selama 27 tahun terakhir Korea menjadi mitra dagang terbesar ketiga di Vietnam, dengan menyumbangkan 20,4% dari nilai perdagangan Vietnam pada tahun 2018.¹⁴ Sementara itu, Investasi langsung dari Korea dan MNC Korea merupakan investor terbesar di Vietnam. Data Statistik dari Ministry of Planning and Investment (MPI) Vietnam, menunjukkan pada 20 Februari 2019, Korea Selatan merupakan

investor terbesar di Vietnam, dengan jumlah proyek terdaftar, 7.592 bernilai 63,7 miliar USD.¹⁵

Kebijakan Doi Moi

Perubahan utama kebijakan Doi Moi tahun 1986 adalah penekanan dalam proses industrialisasi. Pemerintah Vietnam berkonsentrasi membangun tempat yang diperlukan untuk mempercepat laju industrialisasi sosialis ke tahap berikutnya, upaya ini adalah fokus yang utama. Dewan Menteri Vietnam mengeluarkan peraturan yang berisi kebijakan sebagai berikut:¹⁶

1. perbedaan antara kepemilikan negara atas properti yang dialokasikan untuk perusahaan, dan hak manajemen perusahaan untuk menggunakan dan mengelola properti secara langsung.
2. hubungan antara perusahaan dan agen pemerintah.
3. hak perusahaan mengenai perencanaan dan keputusan yang berkaitan dengan pengadaan, penjualan, penetapan harga, akuntansi keuangan, pekerjaan dan gaji.
4. hak mengenai hubungan komersial antara perusahaan.

Selama tahun 1987-1988, pemerintah merasionalisasi dan mengurangi jumlah menteri lini, komite negara, dan lembaga pemerintah pusat lainnya. Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing disahkan oleh Majelis Nasional pada Desember 1987, dan mulai diberlakukan pada September 1988. Diperlukan beberapa tahun untuk menghasilkan arus masuk investasi asing dalam skala besar. Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan juga disahkan Majelis Nasional pada Desember 1987, yang mulai diberlakukan pada tahun 1988. Peraturan tentang kepemilikan tanah dan penggunaan lahan pribadi oleh negara tetap dipertahankan. Meskipun langkah untuk mengubah peraturan ini merupakan salah satu

¹³ Lovells, "Doing Business in Vietnam," *Vietnam's legal system* (2008): 2-5, <https://www.ihk-krefeld.de/de/media/pdf/international/doing-business/vietnam-doing-business-in-vietnam-20082.pdf> (diakses 03/06/19 15:30 WIB).

¹⁴ Vietnam Investment Review, "South Korean firms explore investment opportunities in Vietnam," <https://www.vir.com.vn/south-korean-firms-explore-investment-opportunities-in-vietnam-67275.html> (diakses 07/08/19 19:00 WIB).

¹⁵ Pritesh Samuel, "FDI in Vietnam – Where is the Investment Going?," Vietnam Briefing, <https://www.vietnam-briefing.com/news/fdi-in-vietnam-investment-by-sector.html/> (diakses 25/08/19 1:10 WIB).

¹⁶ Brian Van Arkadie and Raymond Mallon, *Viet Nam: a transition tiger? The introduction of Doi Moi*, (Australia: Australian National University E Press, 2003), 69.

bentuk langkah penting menuju pengenalan tentang hak kepemilikan, UU ini tidak mengizinkan hak pengalihan penggunaan lahan.

Inisiatif reformasi terjadi di beragam sektor yang melibatkan kebijakan investasi, perdagangan, dan badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan yang mengatur tentang investasi, dimulai dengan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing pada tahun 1987. Vietnam menyatukan berbagai UU yang mengatur tentang perusahaan lokal dan asing ke dalam Undang-Undang Investasi Baru tahun 2005.¹⁷ UU tentang BUMN direvisi untuk meminimalkan kekuatan Pemerintah, mempromosikan sektor swasta dan asing, dan memberikan perlakuan sama.¹⁸ Pada tahun 1992 arus masuk investasi utama mulai masuk di Vietnam. Konstitusi Amandemen Vietnam tahun 1992 mengakui peran sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi. Perjanjian Bilateral Perdagangan AS-Vietnam (US-BTA) ditandatangani pada tahun 2001 perjanjian ini merupakan sejarah penting awal perkembangan reformasi ekonomi Vietnam hingga saat ini.

LOE dan LOI Undang-Undang perusahaan dan investasi asing di Vietnam

Rezim investasi di Vietnam mulai berlaku pada 1 Juli 2015 yang mengatur Undang-Undang tentang perusahaan Law On Enterprises (LOE) dan Undang-Undang tentang Investasi Law On Investment (LOI). Kedua UU ini mengatur regulasi investasi dan pendirian perusahaan di Vietnam. LOE & LOI berisi aturan investor domestik dan asing, pendirian perusahaan, operasi korporasi dan investasi dalam proyek. Sebagai alternatif untuk mendirikan atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan Vietnam, entitas bisnis asing dapat

mendirikan kantor perwakilan atau Representative Office (RO) di Vietnam, yang harus dilisensikan oleh otoritas terkait. RO dapat dibentuk sebagai unit dependen dari perusahaan induk asing untuk mencari dan mempromosikan peluang komersial bagi perusahaan induk. LOI dan LOE dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan tertentu dalam UU sebelumnya dan berupaya meningkatkan kualitas dan efisiensi iklim investasi.

Aliran FDI Korea ke Vietnam terjadi dalam tiga gelombang, setelah normalisasi hubungan diplomatik Korea-Vietnam pada tahun 1992. Vietnam mengalami gelombang pertama masuknya investasi Korea yang difokuskan di sektor manufaktur padat karya, yaitu garmen dan tekstil. Gelombang kedua, dimulai pada awal tahun 2000an, ditandai dengan meningkatnya produksi barang-barang elektronik. Sejak 2017 Vietnam telah memulai gelombang ketiga yang berfokus pada barang-barang konsumen seperti, ritel dan jasa. Chaebol atau konglomerat Korea dari CJ Group dapat digolongkan ke dalam gelombang ketiga aktivitas investasi Korea di Vietnam.

Tabel 1

MNC Korea di Vietnam

No.	Perusahaan	Industri
1	Samsung Vina	Elektronik
2	LG Vietnam	Elektronik
3	Lotte Legend	Perhotelan
4	SK E&C	Energi
5	CJ Group Vietnam	Berbagai
6	Lotte Shopping Mall	Hypermarket
7	Daewoo	Pengembangan Properti
8	Kumho Construction	Pengembangan Properti
9	GS Vietnam	Pengembangan Properti
10	Posco Vietnam	Pengembangan Properti
11	Hanjin Logistik	Logistik
12	Vietnam Hyosung	Ban
13	Ban Kumho	Ban
14	Bank Industri Korea	Perbankan
15	Bank Kookmin	Perbankan
16	Bank Shinhan	Perbankan

Sumber: LNT&Partners Korea Investment Profile in Vietnam

¹⁷ Tien Quang Tran, "Sudden Surge in FDI and Infrastructure Bottlenecks The Case in Vietnam," *ASEAN Economic Bulletin* 26, no. 1(2009): 58–76.

¹⁸ World Bank, "Foreign investment policy of viet nam in the process of international economic integration," http://siteresources.worldbank.org/INTR/ANETTRADE/Resources/WBI-Training/vietFIP_dat.pdf diakses 17/08/19 20:00 WIB.

Lebih dari 4.000 perusahaan Korea yang merupakan produsen elektronik seperti, Samsung Electronics, dan LG kini beroperasi di Vietnam. Samsung memiliki kompleks untuk produksi ponsel di Vietnam utara. Produksi ponsel Samsung berskala besar ini telah memberikan kontribusi membawa Samsung ke urutan teratas Produk ekspor di Vietnam. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi minat Korea terhadap iklim bisnis di Vietnam yang

terus meningkat. Salah satunya yaitu, melonjaknya upah tenaga kerja di Cina menyebabkan perusahaan Korea mengalihkan pabrik mereka ke Vietnam.

Daya tarik Vietnam sebagai tujuan FDI Korea diprediksi akan semakin meningkat. Pada tahun 2015 Vietnam memiliki populasi sekitar 91,7 juta jiwa, dengan 69,6 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas. Golongan pekerja usia muda yang umumnya berpendidikan tinggi memberikan peluang besar untuk bekerja di pabrik Korea. Dengan upah minimum bulanan berkisar antara 2,4 juta-3,5 juta VND.¹⁹ Vietnam tetap kompetitif dibandingkan dengan tujuan FDI regional lainnya seperti Thailand sekitar 168 USD per bulan dan China sekitar 240 USD per bulan.²⁰ Sementara negara secara tradisional menjadi tujuan untuk investasi greenfield, perkembangan ini membuat perusahaan Vietnam semakin menarik sebagai target *M&A (Merger dan Akuisisi)*. Vietnam mencatat jumlah rekor dalam aktivitas *M&A* pada tahun 2016, dengan fokus pada sektor properti, barang-barang konsumsi, dan ritel.²¹ Negara ini menghadirkan peluang tidak hanya dalam hal kapasitas produksi, tetapi juga dalam hal pasar domestik yang cukup besar.

Vietnam BIPA

Pada Oktober 2006, Vietnam menandatangani perjanjian bilateral mengenai *Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPA)* dengan 49 negara dan wilayah teritorial di dunia.²²

¹⁹ International Organization for Migration, "Viet Nam Migration Profile 2016," https://publications.iom.int/system/files/pdf/mp_vietnam.pdf (diakses 27/08/19 2:00 WIB).

²⁰ VN Express, "Vietnam on verge of lowest minimum-wage bump in a decade," <http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-on-verge-of-lowest-minimum-wagebump-in-a-decade-3446407.html> (diakses 27/08/19 2:02 WIB).

²¹ Imaa Institute, "M&A Vietnam may see record number of M&A deals in 2016," <https://imaa-institute.org/vietnam-may-see-record-number-of-m-and-a-deals-in-2016/> (diakses 27/08/19 2:06 WIB).

²² World Bank Group, "Foreign investment policy of viet nam in the process of international economic integration,"

Beberapa perjanjian ini memperluas ruang lingkup tentang definisi investasi yang akan dilindungi di Vietnam dengan memasukkan ketentuan mengenai, investasi langsung, investasi portofolio dalam bentuk saham dan obligasi, aset berwujud dan tidak berwujud, hak kekayaan intelektual, hak kontraktual, dan bentuk partisipasi lainnya dalam perusahaan, yang sebagiannya terkandung dalam Undang-Undang tentang Investasi tahun 2005. Meskipun jumlah perjanjian investasi bilateral Vietnam cukup besar, komitmen investasi di Vietnam berdasarkan perjanjian bilateral sangat terbatas. Hanya terdapat beberapa pengecualian, misalnya, beberapa perjanjian ditandatangani setelah diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bilateral AS-Vietnam (BTA) pada tahun 2001.²³ Investor asing diberi perlindungan investasi yang sama dengan investor lokal, diantaranya seperti perlindungan aset dan properti, modal investasi, pendapatan, dan hak sah lainnya. UU LOI menegaskan bahwa modal investasi dan properti sah atau aset investor tidak akan diambil alih dengan tindakan administratif, tetapi dalam suatu kondisi Undang-Undang memperbolehkan pengambilalihan untuk tujuan pertahanan atau keamanan nasional, atau kepentingan nasional lain yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa investor berhak mendapatkan kompensasi pada harga pasar untuk investasi, properti atau aset mereka yang ditentukan pada saat pengambilan keputusan pengambil-alihan. Kompensasi untuk investor asing akan dibayarkan dalam mata uang yang dapat dikonversi secara gratis, dan investor asing memiliki hak untuk mengirimkan kompensasi keluar dari wilayah Vietnam.

Liberalisasi perdagangan di Vietnam pasca tergabung dalam WTO

Peluncuran kebijakan Doi Moi menandai transisi Vietnam menuju "ekonomi pasar yang berorientasi sosialis" dan merupakan awal dari proses integrasi untuk mencapai ekonomi dunia. Fase ini menggambarkan

http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRAD E/Resources/WBI-Training/vietFIP_dat.pdf (diakses 03/06/19 20:00 WIB).

²³ Yeri Yoo and Chan Ho Park, "A Legal Analysis on Free Trade Agreement between Korea and Vietnam," (2011): 43-58, <https://www.klri.re.kr> (diakses 26/07/19 21:00 WIB).

komitmen yang diambil Vietnam untuk bergabung dengan WTO di berbagai aspek ekonomi. Korea juga merupakan ketua di Vietnam WTO Working Group yang sangat berpengaruh dalam hubungan perdagangan bilateral antara kedua negara. Reformasi Vietnam sejak kebijakan Doi Moi telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan lingkungan bisnis lebih menarik investasi asing, mendorong ekspor, dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Tantangan utama yang dihadapi Vietnam di masa depan adalah untuk memastikan keberlanjutan kinerja ekonomi dan menghindari peningkatan ketidakesetaraan yang dapat membahayakan hubungan antara sosial dan stabilitas politik.

Sejak akses Vietnam dalam keanggotaan WTO pada 2007, Vietnam telah berupaya untuk memperluas pengaruhnya di pasar internasional. Vietnam berkomitmen untuk memberikan MFN terhadap investor asing maupun lokal secara merata dan maksimal. Pasca akses Vietnam ke WTO, menurut kementerian keuangan Vietnam, entitas yang sepenuhnya dimiliki asing telah menjadi struktur hukum yang paling umum untuk mengatur masuknya aliran FDI, diikuti oleh JV dan kemudian pengaturan kontrak BOT, BT, BTA, dan BCC.²⁴ Lisensi untuk investor asing sebagian besar diberikan atas kebijakan kementerian. Proses ini dapat memakan waktu sekitar 3 bulan (waktu rata-rata untuk sektor jasa) sampai 12 bulan (untuk proyek skala besar yang membutuhkan persetujuan perdana menteri).²⁵ Dalam praktiknya, investor asing di Vietnam akan diminta untuk mendapatkan kode HS dan lisensi investasi sebelum memulai kegiatan bisnis mereka. Amandemen yang diusulkan akan menghilangkan aturan ini, investor asing hanya akan diminta untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran bisnis dengan cara yang sama seperti perusahaan Vietnam. Penghapusan kode HS akan memungkinkan

²⁴ U.S. & Foreign Commercial Services and U.S. Department of State, "Doing Business in Vietnam," *2011 Country Commercial Guide for U.S. Companies* (2011): 9-12, https://2016.export.gov/pennsylvania/build/groups/public/@eg_us_pa/documents/webcontent/eg_us_pa_037629.pdf (diakses 03/06/19 17.00 WIB).

²⁵ *Ibid.*

aktivitas pebisnis untuk terlibat dalam aktivitas bisnis apapun sesuai dengan hukum yang berlaku di Vietnam.

Tabel 2
Perdagangan Korea-Vietnam

Vietnam-Korea trade (USD bn)		
Year	Imports from Korea	Exports to Korea
2012	15.9	5.7
2013	21.1	7.1
2014	22.4	7.9
2015	27.8	9.8
2016	32.6	12.5
7M 2017	27	8.5

Sumber: Dezan Shira & Associates

Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Korea Selatan (FTA) mulai berlaku pada akhir 2015, kerjasama ini semakin memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Salah satu isi dari perjanjian ini adalah Korea sepakat untuk menghapuskan 95% tarif impor atas Vietnam. Sementara itu Vietnam akan mengurangi 89% tariff impor atas Korea.²⁶ FTA telah memberikan efek nyata pada perdagangan bilateral Korea-Vietnam.

Hubungan Kerjasama Korea Selatan dan Vietnam melalui Korea ODA

Partisipasi proaktif Korea dalam isu-isu regional membawa stabilitas regional, dan posisi Vietnam yang stabil di Asia Tenggara dianggap cocok dengan persyaratan strategis Korea memilih wilayah tersebut. Faktor penting yang telah mempromosikan hubungan bilateral antara Korea-Vietnam adalah berbagi kepentingan bersama untuk membangun negara makmur dan sejahtera bagi rakyatnya dengan menciptakan lingkungan yang damai dan kooperatif. Adanya kesamaan tujuan melatar belakangi berbagai kepentingan dalam membangun dunia yang damai dan stabil. Pada akhir 1980an, Vietnam mengadopsi kebijakan reformasi Doi Moi untuk mengubah negaranya menjadi ekonomi pasar yang berorientasi sosialis, sementara itu Korea

²⁶ Tuoi Tre News, "Vietnam's free trade agreement with South Korea takes effect," <http://tuoitrenews.vn/business/32338/vietnams-free-trade-agreement-with-southkorea-takes-effect> (diakses 27/08/19 1:07 WIB).

Selatan meluncurkan Kebijakan Nord politik-Utara untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara sosialis.²⁷

Berbagai banyak kesamaan dalam hal budaya dan sejarah, semakin memperkuat ikatan damai antara Korea-Vietnam. Vietnam adalah negara yang kompetitif, efisien, dan kaya akan sumber daya. Sedangkan Korea, terkenal dengan kemampuannya menghasilkan barang dan jasa berteknologi tinggi. Selama 20 tahun terakhir, hubungan kerjasama Korea-Vietnam telah berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Hubungan baik ini kemudian diekspresikan dengan memilih tahun 2012 sebagai tahun persahabatan antara Korea Selatan dan Vietnam. Ketika Vietnam bergabung dengan ASEAN pada tahun 1995, Vietnam telah dua kali memegang jabatan sebagai presiden bergilir ASEAN dan menjadi tuan rumah KTT penting ASEAN, di ASEAN +3, APEC, ASEM dan EAS. Salah satu bentuk upaya timbal balik Vietnam terhadap Korea adalah dengan mendukung keterlibatan Korea dalam kemitraan kerjasama strategis dengan ASEAN yang ditandatangani pada Oktober 2010. Peran dan posisi Korea semakin penting dalam mekanisme regional dan global seperti EAS, APEC, ASEM, G20, WTO dan PBB.²⁸ Partisipasi Vietnam sebagai Ketua ASEAN dalam KTT G20 di Seoul dan organisasi regional maupun global merupakan salah satu hasil perkembangan ekonomi Vietnam di kancah internasional.

²⁷ Joon woo, Park, "Korea and Vietnam: The National experiences and foreign Policies of Middle Powers," *Koret Fellow, Shorenstein APARC Stanford University* (2012): 1-5.

²⁸ *Ibid.*

Hubungan Ekonomi Korea-Vietnam

Kerjasama ekonomi adalah komponen penting dalam hubungan bilateral Korea-Vietnam. Vietnam adalah fokus utama Korea untuk membuka hubungan kerjasama dengan ASEAN. Upaya ini bertujuan untuk mempromosikan peran penting Vietnam di Asia Tenggara, konsisten dengan kebijakan strategis Korea di kawasan tersebut. Sementara itu, dari perspektif Vietnam kerjasama ekonomi dengan Korea sangat penting untuk modernisasi dan industrialisasi di Vietnam. Kerjasama dengan Korea juga akan memperkuat posisi Vietnam dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di suatu kawasan menuju diversifikasi dan multilateralisasi dalam konteks perubahan besar di kawasan tersebut. Korea-Vietnam terus mempromosikan hubungan perdagangan untuk mencapai terwujudnya tujuan perdagangan dua arah secara maksimal sebesar 20 miliar USD pada 2015.

Sementara aktif bekerja sama untuk mengurangi hambatan dan menuju keseimbangan perdagangan antara kedua negara, investasi Korea di Vietnam juga meningkat secara substansial. Pada 2011, Korea menjadi investor terkemuka di Vietnam dengan jumlah FDI 22,3 miliar USD untuk 3.072 proyek.²⁹ Angka yang meningkat ini tercermin dalam hubungan ekonomi bilateral antara Korea-Vietnam yang berkembang pesat tidak terlepas dari upaya aktif pemerintah Korea untuk berkontribusi dalam meningkatkan infrastruktur ekonomi dan lingkungan investasi di Vietnam, serta membangun dasar yang kuat untuk kerjasama yang saling menguntungkan melalui ODA.

Penerima pinjaman terbesar ODA

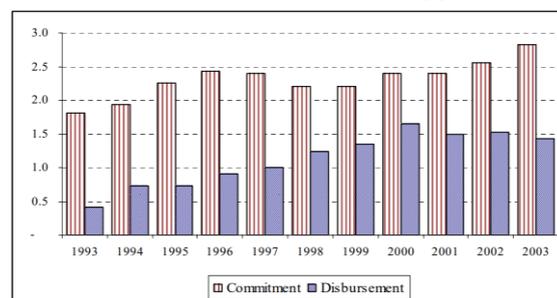
Vietnam merupakan salah satu penerima ODA terkemuka di Asia. Pada tahun 2016 Vietnam menempati urutan kedua, dari 10 besar negara penerima ODA terfavorit di dunia. Disisi lain, Vietnam juga merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia. Hal ini menimbulkan pertanyaan berapa banyak

²⁹ Dezan Shira & Associates, "Vietnam – South Korea Deepening Economic Ties," <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-south-korea-deepening-economic-ties.html/> (diakses 03/06/19 19:00 WIB).

aktor asing yang berkontribusi terhadap kesuksesan ekonomi di Vietnam. Korea Selatan telah menjadi mitra utama bantuan pembangunan asing Vietnam pasca dipulihkannya kerjasama strategis antara kedua negara. Sejak saat itu Korea secara istimewa telah memberi Vietnam bagian terbesar dari dana donornya dalam bentuk hibah dan pinjaman.

Penentu utama dari penyaluran ODA yang cukup besar ini adalah sebagai bentuk peluang komersial yang tersedia di negara penerima dan hubungan diplomatik yang dimiliki oleh kedua negara. Korea merealisasikan ODANYa untuk mencapai manfaat secara komersial seperti perluasan pasar ekspor, lapangan kerja, dan peluang FDI di Vietnam. Korea menunjukkan minat besar dalam mendukung Vietnam untuk mencapai tujuan pembangunan. Konsep bantuan luar negeri telah muncul dengan kuat untuk menjadi salah satu kekuatan utama di balik pertumbuhan ekonomi negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Seperti ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar 1
Aliran ODA di Vietnam tahun 1993-2003



Sumber: Thuc Duc Le, Thi T. Nguyen, Thu H. Nguyen, Thi Hanh Tran

Gambar 1 menunjukkan bahwa aliran masuk ODA tahun 1993-2003 cenderung naik, tetapi tidak selalu tumbuh. Penurunan komitmen ODA pada tahun 1997-1998 adalah efek dari krisis keuangan Asia. Selama periode 1993-2003, pendonor berkomitmen menyalurkan bantuan sebesar 25,4 miliar USD ke Vietnam. Jumlah total ODA yang dicairkan selama periode tersebut adalah 12,5 miliar USD, atau 49% dari total ODA yang disalurkan ke Vietnam.³⁰

³⁰ Thuc Duc Le, Thi T. Nguyen, Thu H. Nguyen, Thi Hanh Tran, Op. Cit., 6.

Konsistensi Korea ODA

Ada beberapa negara di mana jumlah bantuan yang diberikan Korea telah meningkat secara khusus pada tahun-tahun tertentu. Negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, dan Irak, menunjukkan peningkatan yang mencolok dari segi jumlah dan pangsa ODA pada tahun tertentu. Dapat dilihat pada grafik 1 bahwa Statistik ODA di Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari segi alokasi jumlah ODA. Khususnya, peningkatan kegiatan ekonomi antara negara-negara dan hubungan politik yang menguntungkan menjelaskan hubungan antara bantuan dan negara-negara mitra. Satu perubahan spesifik dari penentu ODA adalah akses Vietnam ke WTO pada 2007. sejak saat itu Vietnam mengalami lonjakan FDI yang signifikan. Aliran masuk FDI di Vietnam dan total nilai proyek berlisensi mencapai puncaknya pada 2008.³¹

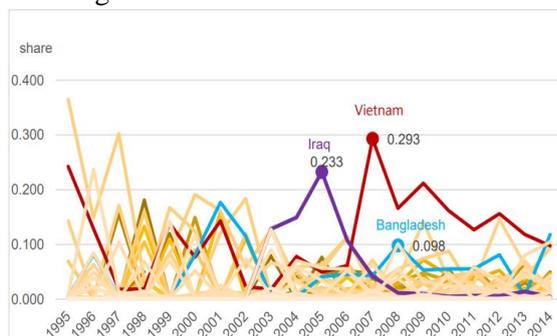
Pasca bergabung dengan WTO, Vietnam dapat mendorong ekonominya untuk mengintegrasikan pasar global karena pembatasan perdagangan berkurang secara substansial, peningkatan perdagangan ini memimpin pertumbuhan ekonomi Vietnam. Hal ini ditandai dengan pada tahun 2009 Korea-Vietnam mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Korea akan mempromosikan lebih banyak investasi di Vietnam dan akan berpartisipasi dalam proyek infrastruktur seperti jalan raya dan transportasi untuk perusahaan Korea.³² Sebagai salah satu perjanjian bersama, Korea menyebutkan akan mempertahankan tren aliran ODA ke Vietnam, khususnya untuk memperluas kerjasama di sektor ketenagakerjaan seperti pelatihan kejuruan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan keselamatan industri. Hasil dari kerjasama ini adalah terciptanya lingkungan perdagangan dan investasi yang lebih liberal antara Vietnam dan Korea sehingga dapat menyebabkan lebih banyak bantuan tersebar

³¹ Tien Quang Tran, "Sudden Surge in FDI and Infrastructure Bottlenecks The Case in Vietnam," *ASEAN Economic Bulletin* 26, no. 1(2009): 59.

³² Nguyen Xuan Thanh and David Dapice, "Vietnam's Infrastructure Constraints," *Harvard Policy Dialogue Papers* (2009): 1-23.

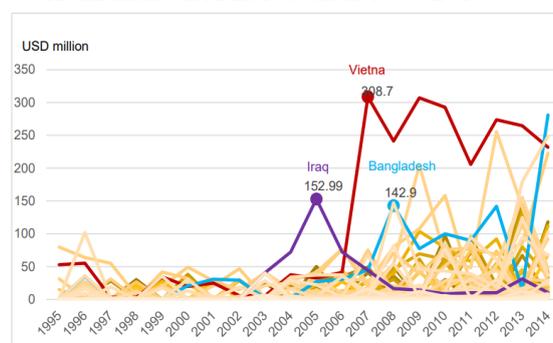
di Vietnam. tindakan ini dianggap sebagai strategi utama kerjasama ekonomi antara Korea dan Vietnam.

Grafik 1
Pangsa ODA Korea tahun 1995-2014



Sumber: Sujung Kim

Grafik 2
Komitmen ODA Korea tahun 1995-2014



Sumber: Sujung Kim

Dari dua grafik diatas, dapat dilihat bahwa jumlah dan porsi ODA ke Vietnam telah menunjukkan ekspansi yang mencolok sejak tahun 2007. Komitmen ODA dari 1995-2006, diperkirakan mencapai rata-rata 26 juta USD dalam setahun. Sedangkan di tahun 2007-2014, rata-rata komitmen ODA ke Vietnam diperkirakan mencapai 265 juta USD dalam setahun. Rata-rata komitmen ODA dalam satu tahun, untuk periode 2007-2014 meningkat sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan komitmen ODA pada tahun 1995-2006.

Peningkatan Jumlah ODA

Doi Moi diluncurkan pada tahun 1986, Vietnam telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 6,25% dari tahun 2000-2017. Pertumbuhan PDB diperkirakan 6,81% di tahun 2017 dengan ekspansi tercepat selama dekade terakhir.³³ ODA telah menjadi sumber daya

³³ The World Bank, "Vietnam Overview,"

penting dalam memfasilitasi pembangunan di Vietnam dengan total jumlah ODA yang disalurkan oleh donor internasional mencapai sekitar 82,61 miliar USD selama periode 1993-2017. ODA Korea menyalurkan lebih dari 1 miliar USD ke Vietnam untuk periode 2011-2015.

Korea terus berkomitmen memberikan ODA dengan anggaran dana 1,5 miliar USD untuk periode 2016-2020 di bawah perjanjian Framework ODA yang ditandatangani pada November 2017.³⁴ Proyek-proyek bantuan pembangunan ODA tidak hanya memenuhi kebutuhan pembangunan Vietnam, tetapi juga sesuai dengan sektor-sektor utama yang berkembang pesat di Korea. Meskipun peran penting dari bantuan pembangunan Korea adalah untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Vietnam. Selama tahun 2007-2016 Vietnam menerima total ODA 1,44 miliar USD dari Korea.³⁵ Sektor-sektor yang menerima jumlah bantuan terbesar diantaranya adalah transportasi, perawatan kesehatan, pasokan air, dan pendidikan. Strategi Kemitraan Negara untuk periode 2016-2020 disetujui, kemudian pada tahun 2017 Korea memberikan anggaran sebesar 1,5 miliar USD melalui pinjaman ODA untuk periode 2017-2020 melalui EDCF.³⁶

Pemerintah Korea memilih 26 negara mitra prioritas untuk menerima dukungan dari ODANYA. Strategi Kemitraan Negara dirancang oleh pemerintah Korea agar dapat dikembangkan selaras dengan strategi pengembangan negara mitra penerima. Program CPS di Vietnam pada periode 2011-2015 dirumuskan oleh Pemerintah Korea sebagai arah kebijakan untuk memberikan bantuan pembangunannya ke Vietnam. Selain itu, berdasarkan area fokus dan tujuan utama dalam Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi (SEDP) dan Strategi Pengembangan Sosial Ekonomi (SEDS) di Vietnam, CPS dirancang untuk mendukung Vietnam dalam mengatasi hambatan saat ini dan untuk mencapai pertumbuhan

berkelanjutan.³⁷ Terdapat tiga sektor utama yang dipilih untuk menerima aliran ODA diantaranya yaitu, sektor Lingkungan dan Pertumbuhan Hijau, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan dan Transportasi. Selain itu, ada daerah lain yang juga menerima bantuan dari ODA Korea seperti pembangunan pedesaan salah satunya adalah proyek desa Saemul Undong. Distribusi ODA Korea ke setiap sektor di Vietnam yang diwakili dalam Strategi telah mengindikasikan bahwa kerjasama pembangunan antara Korea-Vietnam adalah hubungan kooperatif untuk menghasilkan manfaat bersama sebagai kemitraan. Tiga bidang inti dari kerja sama utama ODA Korea dianggap sebagai keunggulan komparatif Korea terhadap negara-negara berkembang termasuk Vietnam. Sebagai imbalannya, area-area inti tersebut juga termasuk dalam kelompok area prioritas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan Vietnam yang berkelanjutan.

<https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview>, (diakses 27/08/19 22:56 WIB).

³⁴ Vu Thanh Huong & Nguyen Thi Minh Phuong, *Op. Cit.*, 5.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bao Binh, "Korea offers US\$1.5 billion ODA loans to Vietnam," <https://e.theleader.vn/korea-offers-us15-billion-oda-loans-to-vietnam-20171110153620693.htm>, (diakses 27/08/19 16:00 WIB).

³⁷ The Government Socialist Republic of Vietnam, "THE DECREE on Public-Private Partnership Investment Form," https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac he:FPbZH88nAi8J:https://www.mzv.cz/public/c6/bd/29/1810623_1462208_Decree_on_PPP_No_15_2015_English.pdf+%&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id (diakses 27/08/19 22:15 WIB).

KESIMPULAN

Pertimbangan politik dan strategis menjadi salah satu penentu Vietnam telah menjadi mitra penting Korea dalam kerjasama strategis dan diplomatik. Vietnam terletak di lokasi yang strategis di mana Vietnam dapat bertindak sebagai "jembatan" atau penghubung antara Korea Selatan dengan negara-negara di lembah Mekong dan ASEAN. Dengan demikian, kedekatan geografis diyakini sebagai faktor yang paling berpengaruh dibandingkan dengan faktor lainnya yaitu karena "bias wilayah" adalah salah satu karakteristik ODA Korea. Kepentingan politik dan ekonomi adalah motif paling menonjol dalam mempengaruhi keputusan Korea Selatan untuk mengalokasikan aliran ODA di Vietnam. Konsistensi pemberian ODA Korea juga dapat dilihat dari pola hubungan kerjasama Korea-Vietnam yang berkembang baik dan kooperatif melalui peningkatan kerjasama kemitraan dengan saling melakukan kunjungan kenegaraan dari pemimpin negara.

Korea adalah mitra dagang penting bagi Vietnam, hal ini terlihat dari pengaruh MNC dan investor Korea yang menjadi penyumbang tertinggi FDI di Vietnam. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Korea memberikan ODANYA lebih besar ke Vietnam, yaitu karena Vietnam berperan sebagai negara yang membuka jalan bagi Korea untuk menjalin kerjasama dan memperluas pengaruhnya di kawasan ASEAN. Selain itu pemerintah Korea dan investor Korea adalah aktor penting yang berkontribusi dalam pertumbuhan ODA dan FDI yang signifikan di Vietnam. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas bisnis di Vietnam yang sangat terbuka bagi MNC Korea dengan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Korea seperti Samsung, LG, Lotte, dan lain-lain. Selain itu, Vietnam juga memiliki keunggulan komparatif untuk aspek tenaga kerja murah dengan tingkat keterampilan dan pendidikan yang tinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain. Korea juga menerima manfaat dari terbukanya akses Vietnam ke WTO, sehingga membuka kesempatan untuk memperluas kerjasama ekonomi perdagangan antara kedua negara secara lebih maksimal.

Bantuan pembangunan ODA yang cenderung terkonsentrasi di wilayah Asia, yang mana 70% dari total ODA disalurkan ke wilayah Asia Tenggara. Vietnam hadir sebagai pilihan yang ideal dengan beberapa manfaat

yang ingin diperoleh Korea jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang sama. Jika dilihat kembali tujuan dari bantuan pembangunan ini adalah untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang, maka Korea perlu untuk mengevaluasi sistem penyaluran bantuan dengan pemerataan di wilayah prioritas. Dengan fokus di negara penerima paling membutuhkan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif dan efisien.

Melalui penelitian ini penulis menemukan kelemahan dari kebijakan bantuan pembangunan ODA, yaitu pertama, pinjaman-pinjaman itu menyebabkan hutang negara yang semakin bertambah. Dengan semakin besar biaya yang dikeluarkan ODA untuk proyek-proyek di Vietnam, hal ini akan berdampak langsung kepada beban pajak yang dikeluarkan masyarakat Vietnam. Kedua, kebijakan ODA Korea menyulitkan birokrasi di Vietnam, karena setiap proyek yang melibatkan ODA harus melalui banyak tahapan pengambilan keputusan sebelum implementasi dapat dilakukan. Sesuai dengan ketentuan ODANYA Korea harus terlibat dalam semua proyek ODA di Vietnam. Kondisi ini dipandang tidak efisien karena memperlambat kecepatan pelaksanaan proyek pembangunan di Vietnam. Korea dapat mensiasatinya dengan menunjuk salah satu diantara KOICA dan EDCF untuk menyalurkan bantuan ODA, sehingga kontrol efektif dapat di implementasikan. Efektivitas dari pemberian Korea ODA dapat mempengaruhi perkembangan dari proyek yang berlangsung di negara penerima. Jika ODA dapat disalurkan dengan efektif dan merata pembangunan proyek di negara tersebut dapat berjalan lancar dalam waktu singkat sehingga negara penerima dapat mencapai target sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Axel Marx and Jadir Soares. "South Korea's Transition from Recipient to DAC Donor: Assessing Korea's Development Cooperation Policy." *International Development Policy Journal* (2013): 107-142.
- Ho-Chul Lee. "Korea's Efforts in Official Development Assistance." *ERI Working Paper*, no. 54 (1997): 1-30.
- Hong-Min, Chun, Elijah N. Munyi and Heejin Lee. "South Korea As An Emerging Donor: Challenges and Changes On Its Entering OECD/DAC." *Journal of International Development* 22 (2010): 788-802.
- Ji, Hyun Oh and Jai, S. Mah. "The Patterns of Korea's Foreign Direct Investment in Vietnam." *Open Journal of Business and Management* 5 (2017): 253-271.
- Joon-woo, Park. "Korea and Vietnam: The National experiences and Foreign Policies of Middle Powers." *Koret Fellow, Shorenstein APARC* (2012): 1-5.

Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip dan Konsepsi dasar*. Jakarta: Rajawali pers, 1994.
- A Samuelson. Paul dan William D. Nordhaus. *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Arkadie, Van Brian and Mallon Raymond. *Vietnam a Transition Tiger?. The Australian National University: Asia Pacific Press*, 2004.
- Balme, Stephanie and Sidel, Mark. *Vietnam's New Order International Perspectives on the State and Reform in Vietnam*. New York: Pallgrave Macmillan, 2007.
- Charles A. McClelland. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Terjemahan oleh Mien Joebhaar & Ishak Zahir. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.
- E Wood, Robert. *From Marshall Plan to Debt Crisis: Foreign Aid Development Choices in the World Economy*. London: University of California Press, 1986.
- Gilpin, Robert. *Global Political Economy:*

Understanding The International Economic Order. New Jersey: Princeton University Press, 2001.

Dokumen Resmi

- Development Cooperation of the Republic of Korea. *DAC Special Review*. Report published by the OECD Development Cooperation Directorate, 2008.
- Development Aid. 2018. *Country Report Vietnam*. Special Report.
- Korea Development Assistance Committee. *DAC Peer Review*. This work is published on the responsibility of the Secretary-General of the OECD, 2012.
- Memorandum of Korea. *OECD DAC Peer Review*. 2017.
- Government of Republic of Korea. *Korea's ODA White Papers*. Committee for International Development Cooperation, 2017.
- The Government Socialist Republic of Vietnam. 2015. *The Decree on Public-Private Partnership Investment Form*.
- U.S. Foreign Commercial Service and U.S. Department of State. *Doing Business in Vietnam*. *Country Commercial Guide for U.S. Companies*, 2011.

Thesis Magister

- Ju Young, Kim. "Rethinking media flow under globalisation: rising Korean wave and Korean TV and film policy since 1980s." *Master's thesis*, University of Warwick. 2007.
- Kim, S. "Trends and the Determinants of Korea's Official Development Aid (ODA) Allocation." *Master's thesis*, Institute of Social Studies The Hague. 2016.
- Minh Thi Thanh Le. "The Increased US-Vietnamese economic trade relations improved the diplomatic and political relations between the two countries since the diplomatic normalization in 1995." *Master's thesis*, University of Wellington. 2013.